

Peran Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Sektor Pariwisata

Oleh : Nanda Arianto Ermi

Kata peran sering diucapkan banyak orang, peran yang dalam hal ini menyangkut seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran menurut (Soerjono Soekanto, 2002), merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Seperti contoh dalam lingkup keluarga kecil, seorang ayah selaku kepala keluarga berperan mendidik anaknya sejak usia dini untuk melakukan hal-hal yang positif dan sampai ia tumbuh dewasa nantinya.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Selain mempunyai pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata utama. (Statista.de, 2016). Salah satu sektor yang mampu memberikan devisa yang besar bagi negara yakni sektor pariwisata. Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar. Masing-masing wilayah memiliki keunikannya tersendiri sehingga jelas terlihat bahwa potensi wisata yang ditunjukkan melalui berbagai objek wisata di Indonesia sangat memberi manfaat dan keuntungan bagi negara Indonesia sendiri. Secara nasional, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia diperkirakan berada pada angka 4,1%. Pemulihan pada sektor ini membutuhkan waktu yang lama. Kondisi pariwisata akan normal kembali pada tahun 2024 dengan kontribusi diperkirakan 4,5%. Sementara itu, pada 2019 lalu, kontribusi sektor pariwisata sebesar 4,7%. Pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia dan kontribusinya pada tataran ekonomi makro harus juga tercermin pada penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan pemerataan pendapatan, mengingat kedua hal tersebut tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDG) nomor

1 dan 10. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2018 lalu gini ratio Indonesia tercatat sebesar 0,384, sedikit lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih baik dari batas psikologis 0,4, tetapi masih menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup lebar. Secara regional, Provinsi Maluku berdasarkan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2019 mencapai 46,2 triliun yang artinya mengalami kenaikan 3,19 triliun dibandingkan tahun 2018. Kenaikan PDRB ini dikarenakan oleh meningkatnya produksi lapangan usaha termasuk sektor pariwisata di Maluku (Maluku.bps.go.id,2019).

Maluku terletak di wilayah timur Indonesia, dengan daerah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan dikenal dengan sebutan “negeri raja-raja” terbentang diantara pulau Sulawesi dan pulau Papua. Sebagai provinsi yang memiliki laut luas, Maluku menyimpan banyak sekali kekayaan alam yang berpotensi sebagai tempat pariwisata. Selain potensi wisata bahari yang besar, Maluku juga memiliki warisan sejarah dan budaya seperti berbagai benteng kolonial, museum gong perdamaian, festival budaya, dan lain-lainnya. Begitu banyaknya potensi keindahan alam juga warisan budaya ini menjadi daya tarik yang besar bagi sektor pariwisata di Maluku dan secara khusus bagi wisatawan mancanegara. Dengan mengembangkan sektor pariwisata tentu dapat meningkatkan perekonomian di Maluku terutama masyarakatnya.

Berdasarkan data BPS tahun 2018, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku relatif tinggi (rata-rata 25,92%) berada diatas rerata tingkat kemiskinan nasional (rata-rata 13,71%), demikian pula dengan tingkat pengangguran di Provinsi Maluku dengan rata-rata 10,8% yang lebih tinggi dari rerata nasional (rata-rata 7,98%). Tribun Maluku berdasarkan data BPS Maluku tahun 2019 memberitakan bahwa PDRB Provinsi Maluku mengalami peningkatan 6,4% dengan pertumbuhan hampir semua lapangan usaha namun sektor usaha pariwisata belum nampak memberikan kontribusi yang berarti. Hal ini ditunjukkan oleh industri pengadaan listrik dan gas yang memberikan kontribusi tertinggi yakni sebesar 9,31% (Chrestiana Aponno, *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* VOL.2 NO. 05 DESEMBER 2020).

Selanjutnya berdasarkan (Survei Jasa akomodasi bulanan, 2019), membuktikan bahwa terjadi fluktuasi jumlah wisatawan mancanegara namun wisatawan domestik terjadi peningkatan tiap bulannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Maluku belum maksimal dalam mempromosikan situs-situs wisata di Maluku yang notabene sangat menarik untuk dieksplor. Kehadiran industri pariwisata Provinsi Maluku untuk lebih maksimal dan aktif dalam mempromosikan potensi-potensi pariwisata yang ada di Maluku sebagai solusi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Maluku. Tentunya ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, akan tetapi selama itu dilakukan dengan mengedepankan semangat membangun pasti akan tercapai dan jangan pernah menyerah.

Sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai aset dalam meningkatkan perekonomian bagi Provinsi Maluku, ternyata belum mampu berkontribusi dengan industri lain sehingga dibutuhkan peran pemerintah serta pengusaha sektor pariwisata untuk lebih mengembangkan industri pariwisata di Provinsi Maluku mengingat Maluku merupakan provinsi yang kaya akan hasil alam, budaya dan sejarah sehingga sangat disayangkan jika aset-aset pariwisata di Maluku tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah Maluku dan masyarakat sebagai aset dalam meningkatkan perekonomian daerah Maluku kedepannya.